Nama: Yana Aprita NPM: 2517053009

Analisis soal 2

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilainilai Pancasila? Jelaskan!

Sistem etika perilaku politik di Indonesia saat ini **masih berada dalam kondisi yang belum ideal**, meskipun sudah ada upaya reformasi sejak era 1998. Secara normatif, perilaku politik seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi:

- 1. Ketuhanan: kejujuran, amanah, kesadaran moral.
- 2. Kemanusiaan: menghormati martabat manusia, bebas dari kekerasan dan intimidasi.
- 3. Persatuan: mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
- 4. Kerakyatan: musyawarah, anti-otoritarianisme, anti-politik uang.
- 5. Keadilan sosial: tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak korupsi.

Namun dalam praktik, terdapat berbagai penyimpangan yang menunjukkan bahwa sistem etika politik belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila, seperti:

- 1. Korupsi.
- 2. Penyalahgunaan jabatan.
- 3. Diskriminasi pelayanan publik.
- 4. Ketidaktransparanan.
- 5. Perilaku birokrasi yang tidak profesional.

Semua ini merupakan indikasi bahwa etika politik saat ini **belum sepenuhnya sesuai** dengan nilai-nilai Pancasila. Penjelasan ketidaksesuaian etika politik pada tiap nilai-nilai pancasila:

- 1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab moral seringkali tidak menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik.
- 2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab belum tercermin dalam pelayanan publik yang semestinya mengedepankan keadilan dan persamaan hak. Banyak aparatur negara masih memperlakukan masyarakat secara tidak adil, terutama ketika kepentingan politik ikut bermain dalam pelayanan birokrasi.
- 3. Nilai Persatuan Indonesia juga belum sepenuhnya diwujudkan, mengingat masih adanya praktik politik identitas dan kepentingan kelompok yang mengancam kohesi sosial.
- 4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga mengalami tantangan karena keputusan politik sering tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang sehat.
- 5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia terhambat oleh rendahnya profesionalisme dan efisiensi birokrasi yang menyebabkan pelayanan publik tidak optimal dan cenderung merugikan masyarakat.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!

Etika generasi muda disekitar tempat tinggal saya **awalnya** memiliki banyak potensi yang positif seperti:

- 1. Aktif dilingkungan sosial.
- 2. Kreatif.
- 3. Inovatif.
- 4. Berani menyuarakan ketidakadilan.

Namun seiring berkembangnya teknologi dan media sosial, mengakibatkan munculnya berbagai persoalan etika seperti:

- 1. Tawuran.
- 2. Perundungan (bullying).
- 3. Pergaulan bebas.
- 4. Penyalahgunaan teknologi.
- 5. Kurangnya sopan santun dalam interaksi.
- 6. Mudah terpengaruh berita palsu.
- 7. Konsumtif dan terjebak budaya pamer (flexing).

Dapat disimpulkan bahwa **belum sepenuhnya dapat mencerminkan** dengan baik nilai-nilai Pancasila, terutama pada:

- 1. Kesopanan dan kemanusiaan (Sila ke-2).
- 2. Persatuan (Sila ke-3).
- 3. Menghargai pendapat orang lain (Sila ke-4).
- 4. Keadilan (Sila ke-5).

Untuk mengatasi berbagai persoalan etika baik dalam dunia politik maupun kehidupan generasi muda, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Dalam ranah generasi muda, pendidikan karakter menjadi fondasi utama. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai Pancasila secara lebih kontekstual melalui kurikulum dan pembiasaan sikap. Keluarga juga harus berperan aktif sebagai teladan utama bagi anak dalam hal disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam tingkat masyarakat, kegiatan positif seperti gotong royong, organisasi kepemudaan, dan kegiatan seni budaya harus kembali diperkuat sebagai wadah pembentukan karakter. Di era digital, literasi media juga sangat penting untuk membekali generasi muda agar lebih kritis, bijak, dan beretika dalam menggunakan teknologi. Pemerintah perlu memberikan ruang kreatif serta dukungan terhadap kegiatan produktif pemuda agar energi mereka tersalurkan secara positif. Sementara dalam konteks etika politik, negara harus memperkuat penegakan hukum, terutama terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem merit dalam birokrasi perlu diterapkan secara konsisten agar pejabat publik dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga harus digencarkan agar publik mampu mengawasi jalannya pemerintahan dan tidak mudah terjebak dalam politik transaksional.